KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Golkar Terima Kenaikan Tunjangan Anggota Dewan
Tanggal : Selasa, 29 September 2015
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Golkar Terima Kenaikan Tunjangan Anggota Dewan

POLITISI Partai Golkar Rambe Kamarul Zaman mengatakan, semestinya kenaikan uang tunjangan anggota Dewan tidak perlu lagi dipersoalkan karena Pemerintah sudah setuju. Selanjutnya, para anggota DPR harus meningkatkan kinerjanya. "Sulit mempersoalkannya karena sudah disetujui pemerintah, *ngapain* dipersoalkan. Kalau disetujui, ya terima kasih saja," kata Rambe.

Rambe mengatakan, dengan gajinya yang sekarang, sebenarnya bisa untuk membiayai keluarganya. Namun, kata dia, sudah lama gaji anggota Dewan tidak naik. Terlebih lagi, angka kenaikan tunjangan yang disetujui pemerintah tidak terlalu besar.

"Paling berapa sih (kenaikan tunjangan). Kalau Fraksi (Golkar) katakan tak setuju (kenaikan tunjangan), saya biasa saja," kata Ketua Fraksi Golkar di MPR itu.

Rambe mengatakan, jika tunjangan anggota Dewan dinaikkan, maka kinerja para wakil rakyat harus diperbaiki, terutama di bidang legislasi. Menurut dia, harus seimbang antara fungsi pengawasan, penyusunan anggaran, dan pembentukan undang undang.

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Achmad Dimyati Natakusumah, mengatakan, kenaikan tunjangan anggota Dewan telah disetujui Menteri Keuangan. Karena itu, mulai bulan depan kenaikan tunjangan akan dikirimkan ke rekening bank anggota DPR.

"Kalau ada teman-teman anggota DPR mengembalikan, tak apa-apa. Tapi, kami (BURT) tidak membatalkan," ujar Dimyati di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, kenaikan tunjangan dilakukan untuk meningkatkan kinerja anggota Dewan. Dia berharap dengan naiknya duit tunjangan, semangat anggota DPR lebih terpacu untuk menyelesaikan tugas-tugas legislasi, pengawasan dan anggaran.

"Saya minta publik terus mengawasi kinerja para wakilnya di parlemen. Jangan sampai, kinerja anggota DPR tidak membaik setelah terima kenaikan tunjangan," kata politikus Partai Persatuan Pembangunan itu.

Kementerian Keuangan melalui surat keputusan Nomor S-520/MK.02/2015 telah menyetujui kenaikan tunjangan, meskipun angkanya di bawah usulan DPR.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, DPR RI memiliki hak untuk menggunakan atau tidak menggunakan kenaikan tunjangan yang sudah disetujui pemerintah. Ia menegaskan bahwa pemerintah hanya merespons permintaan kenaikan tunjangan dan ketentuannya disesuaikan dengan kebutuhan serta ketersediaan anggaran.

Belakangan, sejumlah anggota DPR menolak kenaikan tunjangan tersebut. Di antara yang menolak anggota DPR Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat, dan Fraksi Hanura. ■ ONI

"Sulit mempersoalkannya karena sudah disetujui pemerintah, ngapain dipersoalkan. Kalau disetujui, ya terima kasih saja."